

Tinjauan hukum mengenai tanggung jawab direksi dalam anggapan kerugian di pekerjaan pengadaan barang dan jasa life time extension gt 2 1 dan gt 2 2 pltgu belawan studi kasus putusan pengadilan nomor 42 pid sus k 2014 pn mdn = legal review regarding responsibility of directors of pt perusahaan listrik negara persero in loss presumption of life time extension goods and services job procurement in gas turbine 2 1 and gas turbine 2 2 pltgu belawan case study court decision / Shabrian Jamil Hasry

Shabrian Jamil Hasry, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20412952&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Anggapan kerugian tersebut dipicu dari adanya addendum pekerjaan tambahan pada Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Life Time Extension GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Belawan dimana setelah terjadinya Kontrak, pada saat Penyedia Barang dan Jasa beserta Pengguna Barang dan Jasa yaitu Mapna Co. dengan P.T. PLN Persero melakukan Fact Finding, mereka menemukan adanya kerusakan tambahan dimana kerusakan tersebut tidak termasuk dalam pekerjaan yang ada dalam kontrak. Pekerjaan tambahan tersebut yang dimasukkan ke dalam addendum kontrak dianggap telah merugikan Negara karena membuat nilai kontrak menjadi melebihi HPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari Jaksa Penuntut Umum untuk memberikannya bahwa Tersangkat telah melakukan perbuatan yang merugikan Negara. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab direksi sebagai pengurus PT. PLN Persero dan sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas penetapan pemenang Pengadaan Barang dan Jasa LTE GT 2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, dan apakah benar tindakan yang merugikan Negara dalam kasus ini.

ABSTRACT
The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum on the contract of Life Time Extension Goods and Services Job Procurement in Gas Turbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU following the contract, at the time of providers of goods and services and users of goods and services that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing the Fact Finding procedure, they found some additional damage where the additional damage are not included in its work there in contract. Added work the addendum contract considered to have been included in losses to the state because the additional work caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceiling price (HPS) that has been made by the committee of procurement. Those things being the ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been does an action which losses to the state. In this thesis, writer will talk about the

responsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as the party that provide the approval to the determination of this procurement winner.